

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025**

**KECAMATAN MEGALUH
KABUPATEN JOMBANG**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025 yang selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, angka 4 huruf d yang menyebutkan bahwa "Penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Mei Tahun 2025 untuk Provinsi dan minggu keempat bulan Mei Tahun 2025 untuk Kabupaten/Kota".

Sehubungan hal tersebut, maka disusunlah dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Perangkat Daerah Kecamatan Megaluh dimana dalam proses penyusunannya didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana

program dan kegiatan prioritas yang merupakan tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Megaluh juga dimaksudkan untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta mengakomodasi integrasi program prioritas daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Asta Cita. Penyesuaian ini selanjutnya dituangkan dalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2025 dan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini juga berfungsi sebagai alat ukur bagi perencanaan ulang dari seluruh program kegiatan tahunan Kecamatan Megaluh, sekaligus untuk memberikan informasi data secara makro bagi rencana kerja tahunan sehingga memudahkan dalam melaksanakan program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, efisien, ramah, inovatif dan akuntabel serta memudahkan evaluasi kinerja.

Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan akan makin mendekat pada tataran *clean goverment* dan *good governance*.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Megaluh Tahun 2025, didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 10/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata

Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 45/D);

20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Jombang Nomor Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Bupati Jombang Nomor Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025;
24. Surat Edaran Bupati Jombang Nomor: 000.7.2/214/415.01/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan Renja PD Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Megaluh adalah sebagai berikut :

- ✓ Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kecamatan Megaluh.
- ✓ Menciptakan sinergitas antara prioritas dan sasaran pembangunan Kecamatan Megaluh dengan Renstra Kecamatan, Perubahan RKPD dan RPJMD kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati terpilih.
- ✓ Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Megaluh dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas di bidang pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang mengalami penyesuaian anggaran agar tetap dapat terlaksana dan tidak mengurangi pencapaian target yang telah ditetapkan.

b. Tujuan

Adapun tujuan dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Megaluh adalah sebagai berikut:

- ✓ Sinkronisasi dan Optimalisasi pencapaian target kinerja RPJMD Tahun 2025-2029, khususnya untuk capaian target kinerja tahun 2025.
- ✓ Mewujudkan perencanaan kegiatan yang akuntabel, partisipatif dan bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
- ✓ Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan Tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Perubahan Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Renja PD Kecamatan Megaluh Tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Pada Tahun 2025 terdapat 3 (tiga) prioritas pembangunan, dengan tema/arrah pembangunan daerah pada tahun 2025 yaitu **"Hilirisasi Agrobisnis"**.

Guna mendukung Arah Pembangunan Daerah tersebut maka dalam menjalankan tugasnya ditetapkan tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja PD, dimana tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, maka tujuan yang ingin dicapai dari Renja tahun 2025 adalah Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi dengan indikator :

1. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Megaluh
2. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tiga tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sasaran PD Kecamatan Megaluh tahun 2025 adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kecamatan dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Megaluh.
2. Meningkatnya kualitas layanan publik dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Megaluh.

Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Megaluh pada Tahun 2025 melaksanakan 1 urusan pemerintahan unsur kewilayahan bidang urusan Kecamatan, yang dijabarkan dalam 6 Program, 11 kegiatan dan diimplementasikan dalam bentuk 23 Sub Kegiatan serta telah ditetapkan indikator kinerja program dan kegiatan (*outcome*) dan sub kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tabel 2.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Megaluh Tahun 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
			Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Gedung kantor atau bangunan lainnya
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2025
Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program & keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2025				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026 (Akhir tahun pelaksanaan Renja)	
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I (sesuai SPD)			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	Program: Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	2.360.472.119,00	25,00%	560.881.135,00	25,00%	560.881.135,00
7.01.01.2.01	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%	1.882.500,00	25,00%	1.882.500,00	25,00%	1.882.500,00
7.01.01.2.01.001	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	1,585.000,00	-	1.585.000,00	-	1.585.000,00
7.01.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 laporan	5 laporan	297.500,00	2 laporan	297.500,00	2 laporan	297.500,00

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program & keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2025				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026 (Akhir tahun pelaksanaan Renja)	
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I (sesuai SPD)			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01.2.02	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	100%	2.386.524.658,00	28,57%	558.998.635,00	28,57%	558.998.635,00
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%		100%		100%	
7.01.01.2.02.001	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang/bulan	17 orang/bulan	17 orang/bulan	2.360.472.119,00	17 orang/bulan	546.625.635,00	17 orang/bulan	546.625.635,00
7.01.01.2.02.003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 Dokumen	12 dokumen	71.046.000,00	3 dokumen	12.373.000,00	3 dokumen	12.373.000,00
7.01.01.2.02.005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	385.000,00	1 laporan	0	1 laporan	280.000,00

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program & keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2025				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026 (Akhir tahun pelaksanaan Renja)	
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I (sesuai SPD)			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01.2.05	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Megaluh	100%	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7.01.01.2.05.002	Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	2 paket	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7.01.01.2.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	89.435.750,00	25,00%	20.325.000,00	25,00%	14.560.700,00
7.01.01.2.06.002	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	37 paket	36 paket	27 paket	17.687.250,00	24 paket	4.210.000,00	24 paket	3.531.400,00
7.01.01.2.06.004	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	50.820.000,00	1 paket	7.340.000,00	1 paket	5.350.000,00
7.01.01.2.06.005	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	5.497.500,00	2 paket	3.550.000,00	2 paket	1.032.500,00

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program & keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2025				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026 (Akhir tahun pelaksanaan Renja)	
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I (sesuai SPD)			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.330.000,00	1 dokumen	600.000,00	1 dokumen	350.000,00
7.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	8 laporan	8 laporan	13.134.100,00	2 laporan	3.640.000,00	2 laporan	3.490.000,00
7.01.01.2.06.001	Penyedian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	6 paket	3.158.900,00	6 paket	985.000,00	6 paket	806.800,00
7.01.01.2.07	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	n/a	0%	-	0%	-
7.01.01.2.07.009	Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7.01.01.2.07.010	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program & keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2025				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026 (Akhir tahun pelaksanaan Renja)	
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I (sesuai SPD)			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01.2.08	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	122.909.300,00	25,00%	19.135.728,00	25,00%	28.298.686,00
7.01.01.2.08.002	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	39.789.300,00	3 laporan	7.483.248,00	3 laporan	4.968.520,00
7.01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	27 laporan	25 laporan	25 laporan	83.120.000,00	6 laporan	11.652.480,00	6 laporan	23.330.166,00
7.01.01.2.09	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	85%	85%	85%	132.226.400,00	85,00%	25.702.500,00	85,00%	5.330.000,00
7.01.01.2.09.002	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapanga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	12 unit	12 unit	96.310.000,00	1 unit	21.177.500,00	1 unit	3.300.000,00

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program & keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2025				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026 (Akhir tahun pelaksanaan Renja)	
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I (sesuai SPD)			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	1 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7.01.01.2.09.010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 unit	10 unit	8 unit	24.160.000,00	3 unit	4.525.000,00	3 unit	2.030.000,00
7.01.02	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	85	87,33	87,33	5.390.000,00	-	0	-	2.972.500,00
7.01.02.2.02	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	100%	5.390.000,00	100%	0	100%	2.972.500,00
7.01.02.2.01.003	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 Laporan	12 laporan	5.390.000,00	3 laporan	0	3 laporan	2.972.500,00

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program & keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2025				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026 (Akhir tahun pelaksanaan Renja)	
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I (sesuai SPD)			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.05	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100%	115.275.660,00	20,00%	1.680.000,00	20,00%	12.781.650,00
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%		25,00%		25,00%	
7.01.05.2.01	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kegiatan PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	115.275.660,00	1 laporan	1.680.000,00	1 laporan	12.781.650,00
		Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	
7.01.05.2.01.003	Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 orang	150 orang	150 orang	66.495.660,00	-	1.500.000,00	-	181.650,00
7.01.05.2.01.008	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	48.780.000,00	1 dokumen	180.000,00	1 dokumen	12.600.000,00

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program & keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2025				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026 (Akhir tahun pelaksanaan Renja)	
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I (sesuai SPD)			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.04	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait	100%	100%	100%	1.775.500,00	25,00%	-	25,00%	2.055.000,00
7.01.04.2.02	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	100%	100%	1.775.500,00	25,00%	-	25,00%	2.055.000,00
7.01.04.2.02.001	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.775.500,00	3 laporan	-	3 laporan	2.055.000,00
7.01.06	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%	2.070.000,00	100%	1.035.000,00	100%	-

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program & keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2025				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026 (Akhir tahun pelaksanaan Renja)	
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I (sesuai SPD)		K	Rp.
					K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.06.2.01	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDesa dengan lengkap	13 Desa	13 Desa	13 desa	2.070.000,00	13 desa	1.035.000,00	13 desa	-
7.01.06.2.01.003	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	26 dokumen	26 dokumen	2.070.000,00	26 dokumen	1.035.000,00	26 dokumen	-
7.01.03	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100%	100%	100%	192.448.100,00	-	15.447.500,00	-	12.948.750,00
7.01.03.2.01.	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	26 Lembaga	26 lembaga	192.448.100,00	26 lembaga	15.447.500,00	26 lembaga	12.948.750,00
		Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	13 desa	13 desa	13 desa		-		-	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program & keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2025				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026 (Akhir tahun pelaksanaan Renja)	
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I (sesuai SPD)			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.03.2.01.003	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	173.938.100,00	1 laporan	1.137.500,00	1 laporan	3.475.000,00
7.01.03.2.01.001	Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga kemasyar akatan	78 lembaga kemasyara katan	78 lembaga kemasyar akatan	18.510.000,00	-	14.310.000,00	-	9.473.750,00
TOTAL						3.098.508.329,35		644.206.863,00		499.087.730,00

Dilihat dari Tabel 2.2, Evaluasi Triwulan I Tahun 2025, dari 23 (dua puluh tiga) indikator sub kegiatan terdapat 6 (enam) indikator sub kegiatan yang sudah mencapai target kinerja pada tahun berjalan, yaitu indikator:

1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
3. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
4. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
5. Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
6. Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang belum simetris dengan target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan karena penyesuaian target/keluaran kegiatan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

➤ Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target 3 dokumen terealisasi 0 dokumen (karena dokumen Renja 2026 dan Renja Perubahan 2025 akan ditetapkan pada TB III tahun 2025, sedangkan dokumen Renstra 2025-2029 akan ditetapkan pada TB IV tahun 2025).

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 5 laporan terealisasi 2 laporan (LKjIP 2024 dan Laporan Kinerja dan Anggaran TB I 2025) dan 3 laporan sisanya akan dilaksanakan pada triwulan II, III dan IV (Laporan Kinerja dan Anggaran TB II, III dan IV).

➤ **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 17 orang/bulan terealisasi 17 orang/bulan.

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD

Pada sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan target 12 dokumen terealisasi 3 dokumen karena dokumen verifikasi dilaksanakan tiap bulan, sehingga yang sudah dilaksanakan penatausahaannya 3 dokumen (Januari-Maret) dan sisanya akan dilaksanakan pada TB II, III dan IV.

➤ **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target 27 paket terealisasi 24 paket (karena disesuaikan dengan kebutuhan ATK pada TB I).

b. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Pada sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target 8 laporan terealisasi 2 laporan (laporan perjalanan dinas) dan sisanya akan dilaksanakan pada tribulan II, III dan IV.

➤ **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

a. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Pada sub kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan target 7 unit belum terealisasi karena pengadaan sarana dan prasarana dianggarkan pada TB II.

➤ **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pada sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan target 12 laporan terealisasi 3 laporan (Januari sd. Maret) dan 9 laporan sisanya akan dilaksanakan pada tribulan II, III

dan IV (April sd. Desember 2025).

b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan target 25 laporan terealisasi 6 laporan dan sisanya akan dilaksanakan pada TB II, III dan IV tahun 2025.

➤ **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Pada sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya target 12 unit terealisasi 1 unit dan 11 unit sisanya belum jatuh tempo pembayaran pajaknya sehingga akan dilaksanakan pada tribulan III dan IV.

b. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pada sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan target 8 unit terealisasi 3 unit dan sisanya akan dilaksanakan pada tribulan II, III dan IV sesuai dengan kebutuhan.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

➤ **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**

a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan indikator Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan target 12 laporan terealisasi 3

laporan dan sisanya akan dilaksanakan pada TB II, III dan IV tahun 2025.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

➤ Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan indikator Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan target 4 laporan terealisasi 1 laporan dan sisanya akan dilaksanakan pada tribulan II, III dan IV.

- b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Pada sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan indikator Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa target 78 lembaga kemasyarakatan belum terealisasi karena akan dilaksanakan pada tribulan III.

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

➤ Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan indikator Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian

Negara Republik Indonesia target 12 laporan terealisasi 3 laporan (Januari sd. Maret) dan 9 sisanya akan dilaksanakan pada tribulan II, III dan IV (April sd. Desember 2025).

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

➤ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Pada sub kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa belum terealisasi karena kegiatan Peringatan HUT RI akan dilaksanakan pada Tribulan III dan kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan akan dilaksanakan pada TB IV.

b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Pada sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan indikator Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan target 4 dokumen terealisasi 1 dokumen dan sisanya akan dilaksanakan pada Tribulan II, III dan IV tahun 2025.

Analisis realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Tribulan I adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

➤ Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Tahun 2025 dianggarkan Rp. 1.585.000,00 dan realisasi sampai dengan Tribulan I sebesar Rp. 1.585.000,00 atau tercapai sebesar 100%.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada Tahun 2025

dianggarkan Rp. 297.500,00 dan realisasi sampai dengan Tribulan I sebesar Rp. 297.500,00 atau tercapai sebesar 100%.

➤ **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Tahun 2025 dianggarkan Rp.2.360.472.119,00 dan realisasi sampai dengan Tribulan I sebesar Rp. 546.625.635,00 atau tercapai sebesar 24,30%.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD pada Tahun 2025 dianggarkan Rp. 297.500,00 dan realisasi sampai dengan Tribulan I sebesar Rp. 297.500,00 atau tercapai sebesar 100%.

c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pada Tahun 2025 dianggarkan Rp. 71.046.000,00 dan realisasi sampai dengan Tribulan I sebesar Rp. 17.362.500,00 atau tercapai sebesar 23,61%.

➤ **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor pada Tahun 2025 dianggarkan Rp. 3.158.900,00 dan realisasi sampai dengan Tribulan I sebesar Rp. 916.800,00 atau tercapai sebesar 24,88%.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Tahun 2025 dianggarkan Rp. 17.687.250,00 dan realisasi sampai dengan Tribulan I sebesar Rp. 3.661.400,00 atau tercapai sebesar 34,73%.

c. Penyediaan Bahan logistik kantor

Penyediaan Bahan logistik kantor pada Tahun 2025 dianggarkan

Rp. 50.820,00 dan realisasi sampai dengan Tribulan I sebesar Rp. 5.350.000,00 atau tercapai sebesar 14,48%.

d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Tahun 2025 dianggarkan Rp. 5.497.500,00 dan realisasi sampai dengan Tribulan I sebesar Rp. 1.832.500,00 atau tercapai sebesar 34,78%.

e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pada Tahun 2025 dianggarkan Rp. 2.330.000,00 dan realisasi sampai dengan Tribulan I sebesar Rp. 350.000,00 atau tercapai sebesar 14,88%.

f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD pada Tahun 2025 dianggarkan Rp. 13.134.100,00 dan realisasi sampai dengan Tribulan I sebesar Rp. 3.490.000,00 atau tercapai sebesar 18%.

➤ **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

a. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya pada Tahun 2025 dianggarkan Rp. 24.160.000,00 dan realisasi sampai dengan Tribulan I belum realisasi karena dianggarkan pada TB II.

➤ **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Tahun 2025 dianggarkan Rp. 39.789.300,00 dan realisasi sampai dengan Tribulan I sebesar Rp. 5.968.520,00 atau tercapai sebesar 18,92%.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Tahun 2025 dianggarkan Rp. 83.120.000,00 dan realisasi sampai dengan

Tribulan I sebesar Rp. 21.230.166,00 atau tercapai sebesar 19,78%.

➤ **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan pada Tahun 2025 dianggarkan Rp.96.310.000,00 dan realisasi sampai dengan Tribulan I sebesar Rp. 6.700.000,00 atau tercapai sebesar 12,88%.
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Tahun 2025 dianggarkan Rp. 11.756.400,00 dan realisasi sampai dengan Tribulan I sebesar Rp. 4.030.000,00 atau tercapai sebesar 36,87%.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

➤ **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**

- a. Peningkatan efektivitas kegiatan Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan
Peningkatan efektivitas kegiatan Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Tahun 2025 dianggarkan Rp. 5.390.000,00 dan realisasi sampai dengan Tribulan I sebesar Rp. 2.720.500,00 atau tercapai sebesar 50%.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

➤ **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

- a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Tahun 2025 dianggarkan Rp. 173.938.100,00 dan realisasi sampai dengan Tribulan I sebesar Rp. 6.475.000,00 atau tercapai sebesar 2,63%.

- b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa pada Tahun 2025 dianggarkan Rp. 18.510.000,00 dan realisasi sampai dengan Tribulan I sebesar Rp. 8.973.750,00 atau tercapai sebesar 59,54%.

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

➤ Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Tahun 2025 dianggarkan Rp. 1.755.500,00 dan realisasi sampai dengan Tribulan I sebesar Rp. 965.000,00 atau tercapai sebesar 57,32%.

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

➤ Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa pada Tahun 2025 dianggarkan Rp. 2.070.000,00 dan belum ada realisasi sampai dengan Tribulan I karena kegiatan akan dilaksanakan pada TB II.

6. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

➤ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Tahun 2025 dianggarkan Rp. 66.495.650,00 dan realisasi sampai dengan Tribulan I sebesar Rp. 681.650,00 atau tercapai sebesar 1,21%.

b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan pada Tahun 2025 dianggarkan Rp. 48.780.000,00 dan realisasi sampai dengan Tribulan I sebesar Rp. 12.600.000,00 atau tercapai sebesar 37,73%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan PD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kecamatan Megaluh merupakan lembaga pemerintah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, oleh sebab itu maka peningkatan pelayanan Kecamatan terhadap masyarakat Kecamatan Megaluh, baik yang terkait dengan pelayanan administrasi persuratan, fasilitasi kegiatan sosial ekonomi, pembangunan sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat dalam arti yang luas adalah merupakan tugas utama.

Secara umum, dasar penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan Megaluh adalah Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat. Maksud dilimpahkannya sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk mempertegas dan memberi kepastian hukum bagi

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat sebagai Perangkat Daerah. Adapun tujuan dilimpahkannya sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Camat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Megaluh menyelenggarakan 1 (satu) Urusan yaitu Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut :

1. Capaian Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program Sampai dengan periode tribulan I tahun 2025, Kecamatan Megaluh telah menganggarkan penyusunan dokumen perencanaan sejumlah 3 dokumen, laporan capaian kinerja sebanyak 5 laporan, dan laporan keuangan sebanyak 1 laporan.

Tahun 2025 s/d. TB I belum terealisasi penyusunan dokumen perencanaan karena Renja 2026 dan Renja Perubahan 2025 akan ditetapkan pada TB III tahun 2025, sedangkan Renstra 2025-2029 akan ditetapkan pada TB IV tahun 2025. Dokumen laporan keuangan telah disusun pada TB I (CALK 2024). Dokumen laporan capaian Kinerja telah disusun sebanyak 2 laporan (LKjIP 2024 dan Laporan capaian kinerja dan anggaran TB I) dan 3 laporan sisanya akan dilaksanakan pada Tribulan II, III dan IV.

2. Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan Terdapat beberapa kegiatan dalam upaya mencapai peningkatan pelayanan kecamatan yaitu terselenggaranya Musrenbang kecamatan, terlaksananya kegiatan pelayanan PATEN, terselenggarakannya peringatan HUT RI di Kecamatan Megaluh, dilaksanakannya kegiatan pembinaan administrasi desa oleh Tim Pembina Kecamatan, pembinaan PKK sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 bahwa analisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau indikator-indikator lainnya yang sesuai

dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Dalam hal ini Kecamatan Megaluh menggunakan indikator yang mencerminkan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi. Evaluasi capaian kinerja pelayanan disajikan dengan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Megaluh
Kabupaten Jombang

NO	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat daerah			Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	-	-	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan</i>	-	-	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	3 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	5 laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5	<i>Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu</i>	-	-	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6	<i>Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan</i>	-	-	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	17 orang/bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
8	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	12 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

NO	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat daerah			Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	1 laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan MEGALUH	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
11	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
12	<i>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</i>	-	-	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
13	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	38 paket	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
14	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	1 paket	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
15	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	2 paket	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
16	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
17	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	6 laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
18	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	4 paket	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

NO	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat daerah			Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	yang Disediakan									
19	<i>Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur</i>	-	-	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
20	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	2 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
21	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	20 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
22	Jumlah Unit aset tetap Lainnya yang Disediakan	-	-	1 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
23	<i>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	-	-	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
24	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	12 laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
25	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	26 laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
26	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
27	<i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>	-	-	85%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
28	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	12 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
29	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

NO	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat daerah			Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi									
30	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	-	6 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
31	Nilai Paten Kecamatan	-	-	82	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
32	<i>Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar</i>	-	-	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
33	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
34	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	-	-	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
35	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	-	-	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
36	<i>Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/ PHBA</i>	-	-	1 laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
37	<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam</i>	-	-	4 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
38	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-	-	150 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
39	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	4 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

NO	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat daerah			Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
40	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	-	-	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
41	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	-	-	12 kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
42	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	12 laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
43	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	-	-	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
44	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	-	-	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
45	<i>Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa</i>	-	-	26 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
46	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	26 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

NO	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat daerah			Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
47	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	-	-	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
48	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	-	-	26 lembaga	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
49	<i>Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina</i>	-	-	26 lembaga	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
50	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	4 laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	-	-	n/a	100%	100%	100%	25%	100%	25%
2	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	-	-	n/a	100%	100%	100%	25%	100%	25%
3	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	-	-	n/a	2 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	100%	0%
4	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	-	-	n/a	5 laporan	5 laporan	5 laporan	2 laporan	100%	40%

NO	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat daerah			Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Kinerja SKPD									
5	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	-	-	n/a	100%	100%	100%	28,57%	100%	28,57%
6	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	-	-	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	-	-	n/a	17 orang/bulan	17 orang/bulan	17 orang/bulan	17 orang/bulan	100%	90,91%
8	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	n/a	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	100%
9	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	n/a	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	3 dokumen	100%	23,61%
10	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec MEGALUH	-	-	n/a	100%	n/a	100%	n/a	100%	n/a
11	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	n/a	14 paket	n/a	14 paket	n/a	100%	n/a
12	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	-	-	n/a	100%	100%	100%	25%	100%	25%
13	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	n/a	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	100%	100%
14	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	n/a	36 paket	27 paket	36 paket	24 paket	100%	88,89%

NO	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat daerah			Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	yang Disediakan									
15	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	n/a	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	100%
16	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	n/a	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	100%
17	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	n/a	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%
18	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	n/a	8 laporan	8 laporan	8 laporan	2 laporan	100%	25%
19	Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	-	-	n/a	100%	100%	100%	0%	100%	0%
20	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	n/a	46 unit	7 unit	46 unit	0 unit	100%	0%
21	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	n/a	1 unit	n/a	1 unit	n/a	100%	n/a
22	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	-	n/a	100%	100%	100%	25%	100%	25%
23	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	n/a	12 laporan	12 laporan	12 laporan	3 laporan	100%	25%
24	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	n/a	25 laporan	25 laporan	25 laporan	6 laporan	100%	24%
25	Persentase Barang Milik Daerah dalam	-	-	n/a	85%	85%	85%	85%	100%	100%

NO	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat daerah			Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	kondisi baik									
26	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	-	-	n/a	10 unit	10 unit	10 unit	1 unit	100%	10%
27	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	n/a	10 unit	8 unit	10 unit	3 unit	100%	37,50%
28	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	n/a	1 unit	n/a	1 unit	n/a	100%	n/a
29	Nilai PATEN Kecamatan	-	-	n/a	83	84	87,33	-	116,46%	-
30	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	-	-	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
31	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	-	-	n/a	12 laporan	12 laporan	12 laporan	3 laporan	100%	25%
32	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	-	-	n/a	100%	100%	100%	20%	100%	20%
33	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	-	-	n/a	100%	100%	100%	25%	100%	25%
34	Jumlah Laporan kegiatan PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	-	-	n/a	5 laporan	5 laporan	5 laporan	1 laporan	100%	20%

NO	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat daerah			Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
35	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	-	-	n/a	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	100%	25%
36	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-	-	n/a	150 orang	150 orang	150 orang	-	100%	-
37	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	n/a	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	100%	25%
38	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait	-	-	n/a	100%	100%	100%	25%	100%	25%
39	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	-	-	n/a	100%	100%	100%	25%	100%	25%
40	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	n/a	12 laporan	12 laporan	12 laporan	3 laporan	100%	25%
41	Persentase Laporan Realisasi APBDesa tepat waktu	-	-	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
42	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDesa dengan lengkap	-	-	n/a	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	100%	100%
43	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan	-	-	n/a	26 dokumen	26 dokumen	26 dokumen	26 dokumen	100%	100%

NO	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat daerah			Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa									
44	Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	-	-	n/a	100%	100%	100%	-	100%	-
45	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	-	-	n/a	26 lembaga	26 lembaga	26 lembaga	26 lembaga	100%	100%
46	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	-	-	n/a	13 desa	13 desa	13 desa	-	100%	-
47	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	n/a	4 laporan	4 laporan	4 laporan	1 laporan	100%	25%
48	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	-	-	n/a	78 lembaga kemasyarakatan	78 lembaga kemasyarakatan	78 lembaga kemasyarakatan	-	100%	-

23 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Tingkat Kinerja Pelayanan PD

Tingkat Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Megaluh dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, adalah:

- a. Kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan aparaturnya pemerintahan desa dan kecamatan perlu ditingkatkan, baik dari aspek kompetensi teknis, manajerial, maupun etika pelayanan publik. Hal ini penting agar aparaturnya mampu menjalankan tugas dengan profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.
- b. Sarana dan prasarana pelayanan publik yang belum optimal juga menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, efisien, dan inklusif. Fasilitas pelayanan yang belum memadai dapat mengurangi kenyamanan masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.
- c. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), BUMDes Bersama (BUMDesma), serta berbagai lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan masih belum optimal dalam mendorong pembangunan ekonomi desa. Keterlibatan dan penguatan kelembagaan ini sangat penting untuk menciptakan kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu upaya pendampingan dan fasilitasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas, tata kelola, serta sinergi antar-lembaga.
- d. Penguatan wawasan kebangsaan juga menjadi aspek strategis yang harus terus dikembangkan, khususnya dalam membangun

semangat persatuan, cinta tanah air, dan kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui sosialisasi, pendidikan kebangsaan, dan pelibatan aktif masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, diharapkan nilai-nilai kebangsaan dapat terinternalisasi secara kuat di tengah masyarakat desa dan kelurahan.

Keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Megaluh pada tahun 2025 adalah merupakan upaya dalam mencapai target dan sasaran pembangunan dimana hal tersebut telah ditetapkan di dalam RPJMD tahun 2025-2029 yakni untuk menghasilkan produk-produk perencanaan yang berkualitas dan akuntabel, dalam artian bahwa perencanaan pembangunan dilakukan dengan terukur dan tepat sasaran, baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga memudahkan didalam proses monitoring, evaluasi maupun pengendalian serta nantinya diharapkan dapat memberikan arah dan kebijakan dalam mengatasi permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terjadi pada tahun berjalan.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi misi dan tujuan RPJMD 2024-2029 adalah:
 - a. Terhambatnya pemenuhan target dan sasaran yang telah ditetapkan didalam RPJMD tahun 2025-2029.
 - b. Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan yang berdampak pada kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat dan tingkat kesejahteraan.
 - c. Anggaran dana yang tertuang dalam DPA Kecamatan Megaluh belum dapat mengakomodir seluruh kebutuhan sehingga berdampak pada pencapaian prioritas pembangunan daerah keempat yang tertuang dalam dokumen P-RKPD Kab. Jombang tahun 2025 yakni peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

Penyusunan Rencana Kerja PD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan Kabupaten Jombang sehingga semua langkah-langkah yang

disusun dalam Renstra Kecamatan Megaluh sejalan dengan Visi Misi Bupati Terpilih.

Visi Misi Bupati:

Kecamatan Megaluh merupakan bagian dari sistem pemerintahan daerah yang menjalankan tugas atas pelimpahan sebagian urusan pemerintahan umum dari Bupati. Tugas tersebut mencakup pelayanan publik, administratif, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan lintas sektor, fasilitasi ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam konteks RPJMD Kabupaten Jombang 2025–2029, tugas tersebut sangat relevan dengan visi daerah: **"Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua"**.

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi kepala daerah terpilih dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, Kecamatan Megaluh secara spesifik dan dominan berkontribusi terhadap Misi ke-5, yaitu **"Menghadirkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Kolaboratif"**. Misi ini tercermin melalui berbagai peran strategis yang dijalankan kecamatan, seperti penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang diarahkan untuk menjadi layanan publik yang akuntabel, cepat, dan transparan. Selain itu, Kecamatan Megaluh juga menjalankan fasilitasi terhadap penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desadan kecamatan sebagai bagian dari proses perencanaan partisipatif yang menjamin akuntabilitas pembangunan daerah. Fungsi koordinasi antar instansi kewilayahan melalui Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) juga dijalankan secara aktif guna memastikan sinergi program dan respons yang cepat terhadap berbagai isu di wilayah.

Peran lain yang tidak kalah penting adalah penguatan kapasitas pemerintahan desa melalui pembinaan regulatif, pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran desa, serta pembinaan lembaga-lembaga

kemasyarakatan seperti BPD, LPM, RT, dan RW. Dalam kerangka pemerintahan yang terbuka, Kecamatan Megaluh juga mendorong penyebarluasan informasi publik serta memfasilitasi aspirasi masyarakat agar proses pemerintahan menjadi lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Dengan kata lain, Kecamatan Megaluh memiliki tanggung jawab strategis dalam menjamin bahwa prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dapat hadir hingga ke level paling bawah, yaitu desa dan masyarakat. Peran kecamatan sebagai simpul koordinasi pemerintahan kewilayahan menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya kepala daerah untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, adaptif, dan partisipatif.

Lebih lanjut, keterkaitan antara peran Kecamatan Megaluh dengan **Asta Cita ke-7, yakni "Reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pemberantasan korupsi dan narkoba"**, semakin nyata dalam berbagai inisiatif tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kecamatan Megaluh aktif mendorong penguatan integritas aparatur melalui internalisasi nilai-nilai ASN BerAKHLAK, penerapan pelayanan publik yang bebas dari pungutan liar dan gratifikasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program dan anggaran secara partisipatif dan transparan. Selain itu, melalui kolaborasi dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), Kecamatan Megaluh juga berperan dalam upaya preventif pemberantasan narkoba dan pembinaan masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Di bidang birokrasi, langkah-langkah perbaikan prosedur layanan, digitalisasi administrasi, serta peningkatan kompetensi dan integritas SDM terus dilakukan sebagai bagian dari reformasi birokrasi di tingkat kecamatan. Dengan demikian, Kecamatan Megaluh tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan secara administratif, tetapi juga menjadi aktor penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, responsif, dan berintegritas, sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita ke-7.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibagi dalam bidang urusan, yaitu:

1. Perumahan Rakyat

2. Pemerintahan Dalam Negeri
3. Sosial
4. Kesehatan
5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Lingkungan Hidup
7. Keluarga Berencana dan Sejahtera
8. Pendidikan
9. Pekerjaan Umum
10. Ketahanan Pangan
11. Kesenian
12. Komunikasi dan Informasi

Telaahan terhadap Visi Misi Bupati Jombang dalam hal ini Kecamatan Megaluh, mengampu Sasaran RPJMD 2025-2029: ***Tersedianya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif***, mendukung SPM di bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Pencapaian visi dan misi Kabupaten Jombang tidak terlepas dari Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh masing-masing PD sesuai dengan bidang urusannya. Oleh karena itu dengan melaksanakan tugas dan fungsi yang mengacu pada cakupan dan kualitas pelayanan dasar maka tujuan RPJMD Kabupaten akan tercapai.

Dampak Terhadap Pencapaian Visi Misi Bupati terhadap Program Internasional SDGs (Sustainable Development Goals) adalah sebuah dokumen yang akan menjadi acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. SDGs (Sustainable Development Goals) merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dibangun MDGs (Millennium Development Goals). Ini merupakan hasil pertemuan pada 25-27 September 2015 di markas besar PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), New York, Amerika Serikat yaitu Sustainable Development Summit, yang di dalamnya merupakan kegiatan seremoni pengesahan dokumen SDGs (Sustainable Development Goals) yang dihadiri perwakilan dari 193 negara.

Adapun tujuan SDGs adalah:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan

- meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.

Target utama SDGs adalah mengentaskan kemiskinan. Tapi, Indonesia akan menggunakan tiga indikator terkait dengan dokumen SDGs, yaitu pembangunan manusia atau human development yang meliputi pendidikan dan kesehatan, lingkungan atau social economic development dan lingkungan yang besar atau environmental development berupa ketersediaan kualitas lingkungan dan sumber daya alam yang baik. SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global berikut ini :

1. Tanpa Kemiskinan, Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
2. Tanpa Kelaparan, Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
4. Pendidikan Berkualitas Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Kesetaraan Gender Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
6. Air Bersih dan Sanitasi Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
7. Energi Bersih dan Terjangkau Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern

untuk semua orang.

8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10. Mengurangi Kesenjangan Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
13. Aksi Terhadap Iklim Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Kehidupan Bawah Laut, Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.
15. Kehidupan di Darat Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemaknaan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Telaahan tujuan Kabupaten Jombang yang terkait dengan PD Kecamatan Megaluh memberikan gambaran peran serta keterlibatan secara langsung terhadap tujuan global SDGs yaitu sebagai berikut:

Sasaran: ***Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui Sinergitas kecamatan*** mendukung tujuan global SDGs yang ke-16 yakni: Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

Program/Kegiatan yang dilaksanakan di setiap PD di Kabupaten Jombang dalam hal ini Kecamatan Megaluh mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah yang berkesinambungan dengan program SDGs.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

Tantangan :

- a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan;
- b. Jaringan Internet yang masih terkadang crowded berpengaruh pada terhambatnya proses pelayanan kepada masyarakat;
- c. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan;
- d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkualitas terkait dengan peningkatan pelayanan publik;
- e. Terbatasnya jumlah personel aparaturnya kecamatan

Peluang :

- a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
- b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang pemeliharaan secara berkala;
- c. Mengikutsertakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi

masyarakat secara santun dan menyenangkan;

- d. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan;
- e. Untuk memperkuat kapasitas dan menjaga motivasi kerja pegawai diperlukan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan, sebagai upaya merespon tuntutan eksternal untuk selalu memperbaiki kinerja serta optimalisasi dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern dan pengawasan melekat.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Megaluh terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

- 5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:

- a. Perencanaan Pembangunan

- Dalam Perencanaan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2025, telah dilaksanakan melalui kegiatan Musrenbangcam, tetapi masih terdapat beberapa usulan yang belum terealisasi, dikarenakan terbatasnya anggaran pada APBD Kab. Jombang.
- Diperlukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dengan melibatkan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan rencana strategis tahun 2025- 2029 sehingga diperlukan output yang lebih aspiratif.
- Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir sebagai modal database dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

- b. Keamanan dan Ketertiban

Pada Tahun Anggaran 2025, PD Kecamatan Megaluh dalam bidang keamanan dan ketertiban melakukan penertiban, pembinaan, pemantauan sehingga wilayah Kecamatan Megaluh dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif

dan untuk meningkatkan kinerja perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung.

- c. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pada Tahun Anggaran 2025, telah berhasil dilaksanakan oleh PD Kecamatan Megaluh melalui 1 (satu) Program rutin dan 5 (lima) program Kecamatan.

- d. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Diperlukan pembinaan lebih intensif dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa agar potensi yang ada dapat lebih berkembang serta dapat bersaing di era globalisasi diantaranya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), perdagangan transnasional, serta perkembangan teknologi informasi.

2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun PD Kabupaten.

Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Kecamatan Megaluh sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Rancangan rencana kerja Kecamatan Megaluh didiskusikan dalam pembahasan Forum SKPD tingkat Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang

direncanakan.

Usulan program dan kegiatan masyarakat telah diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Megaluh dengan mempertimbangkan aspek-aspek kajian kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan jumlah anggaran, serta tantangan yang dihadapi dan peluang yang dapat dioptimalkan.

Dari proses penyelarasan beberapa isu penting yang diekspose dalam dokumen ini dengan usulan program dan kegiatan masyarakat, telah dituangkan beberapa kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 yang berkaitan dengan :

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana strategis yang bersifat aspiratif, maka akan diadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam penyusunan Renstra.
- b. Pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan adalah meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program di seluruh Desa.
- c. Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir sebagai bahan dalam penyusunan monografi kecamatan, dengan mengoptimalkan peran perangkat desa yang dinamis sebagai petugas *collecting data*,
- d. Pemerataan pembangunan fisik untuk mereduksi ketimpangan perkembangan pembangunan antar wilayah sekaligus memberdayakan sumber daya lokal melalui kegiatan padat karya.

Secara umum, usulan program dan kegiatan masyarakat telah selaras dengan kebutuhan sebagaimana telah direncanakan oleh Kecamatan Megaluh sehingga kondisi sinergis ini dapat dengan lancar dituangkan dalam dokumen perencanaan dan diharapkan dapat berhasil dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan pemilahan dan pembahasan pada Forum SKPD dan berpedoman pada Perubahan RKPD Kab. Jombang Tahun 2025, maka ditetapkan Perubahan Renja Kecamatan Megaluh Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA
PERUBAHAN KECAMATAN MEGALUH TAHUN 2025

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kerangka Pendanaan Tahun 2024
1	2	3	4	5
7 01 01	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	2.757.389.069,35
7 01 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100%	1.882.500,00
7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	1.585.000,00
7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	297.500,00
7 01 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	2.431.903.119,35
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	
7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17 orang/bulan	2.360.472.119,35
7 01 01 2.02 0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	385.000,00
7 01 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	71.046.000,00
7 01 01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec. Megaluh	n/a	n/a

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kerangka Pendanaan Tahun 2024
1	2	3	4	5
7 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	n/a	n/a
7 01 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	92.627.750,00
7 01 01 2.06 0001	Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	3.158.900,00
7 01 01 2.06 0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 paket	17.687.250,00
7 01 01 2.06 0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	50.820.000,00
7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	5.497.500,00
7 01 01 2.06 0006	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.330.000,00
7.01.01.2.06 0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	13.134.100,00
7 01 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	122.909.300,00
7 01 01 2.08 0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 laporan	39.789.300,00

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kerangka Pendanaan Tahun 2024
1	2	3	4	5
	listrik	Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
7 01 01 2.08 0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	83.120.000,00
7 01 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	85%	108.066.400,00
7 01 01 2.09 0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	12 unit	96.310.000,00
7 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	9 unit	11.756.400,00
7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	84	5.390.000,00
7 01 02 2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	5.390.000,00
7 01 02 2.02 0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan	5.390.000,00
7 01 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	115.275.660,00
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	
7 01 05 2.01	Kegiatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	Jumlah Laporan kegiatan PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang	5 laporan	115.275.660,00

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kerangka Pendanaan Tahun 2024
1	2	3	4	5
	Kepala Daerah	dilaksanakan		
		Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	
7 01 05 2.01 0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 orang	66.495.660,00
7 01 05 2 01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	48.780.000,00
7 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait	100%	1.775.500,00
7 01 04 2.02	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	1.775.500,00
7 01 04 2.02 0001	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	1.775.500,00
7 01 06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	2.070.000,00
7 01 06 2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDesa dengan lengkap	13 desa	2.070.000,00
7 01 06 2.01 0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	2.070.000,00
7 01 03	Program Pemberdayaan	Persentase desa yang perencanaan	100%	192.448.100,00

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kerangka Pendanaan Tahun 2024
1	2	3	4	5
	Masyarakat Desa dan Kelurahan	pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif		
7 01 03 2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	192.448.100,00
		Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	13 desa	
7 01 03 2.01 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	173.938.100,00
7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga	18.510.000,00
TOTAL ANGGARAN				3.098.508.329,35

BAB III

PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan RKPD juga harus memperhatikan **Asta Cita** (delapan misi) Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi fondasi bagi visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045": Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah sebagai berikut:

- Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan serta mendorong kemandirian bangsa (swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, hijau, dan biru).
- Menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur.
- Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, dan peran perempuan, pemuda, penyandang disabilitas.
- Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk nilai tambah dalam negeri.
- Pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- Reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pemberantasan korupsi dan narkoba.
- Mengharmonisasikan kehidupan dengan lingkungan, alam, budaya, dan meningkatkan toleransi antarumat beragama.

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Megaluh Tahun 2025 (Perubahan Renja), perlu dilakukan penyesuaian dan penajaman program serta kegiatan agar sejalan dengan arah kebijakan nasional, khususnya misi pemerintahan yang tertuang dalam **Asta Cita ke-7**, yaitu "*Reformasi politik*,

hukum, dan birokrasi serta pemberantasan korupsi dan narkoba”, serta selaras dengan **tema RKP 2025**, yakni *”Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”*. Dalam konteks ini, Kecamatan Megaluh menempatkan peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi sebagai tujuan utama dari pelaksanaan Perubahan Renja, mengingat peran strategis kecamatan sebagai simpul koordinasi dan pelayanan publik terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Akuntabilitas birokrasi menjadi fondasi utama dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif dan terpercaya. Oleh karena itu, reformasi birokrasi di tingkat kecamatan diarahkan untuk memperkuat sistem perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan kinerja secara transparan dan berbasis hasil. Dalam konteks Asta Cita ke-7, Kecamatan Megaluh berkewajiban melakukan konsolidasi internal guna menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik, efisiensi proses kerja, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip good governance. Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan program kerja yang mendukung peningkatan kapasitas aparatur, penguatan peran evaluasi dan pelaporan kinerja, serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk digitalisasi layanan dan pelaporan berbasis data. Selain itu, melalui kolaborasi dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), Kecamatan Megaluh juga berperan dalam upaya preventif pemberantasan narkoba dan pembinaan masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Di bidang birokrasi, langkah-langkah perbaikan prosedur layanan, digitalisasi administrasi, serta peningkatan kompetensi dan integritas SDM terus dilakukan sebagai bagian dari reformasi birokrasi di tingkat kecamatan.

Sejalan dengan hal tersebut, penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Megaluh 2025 menempatkan sejumlah fokus utama. Pertama, adalah penyederhanaan alur layanan administrasi publik melalui pemanfaatan sistem informasi kecamatan yang terintegrasi dengan kabupaten, guna memastikan proses

pelayanan lebih cepat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, penguatan akuntabilitas dilakukan melalui peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja, termasuk pengembangan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang spesifik, terukur, dan relevan dengan kondisi wilayah. Ketiga, peningkatan pengawasan internal dan pelaporan dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik, forum evaluasi lintas sektor, dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyampaian umpan balik terhadap layanan Pemerintah.

Selain itu, semangat pemberantasan korupsi sebagaimana ditekankan dalam Asta Cita ke-7 juga diinternalisasi dalam budaya kerja Kecamatan Megaluh, salah satunya melalui transparansi anggaran, publikasi rencana kegiatan secara terbuka, serta peningkatan integritas aparatur melalui pembinaan nilai ASN Ber-AKHLAK. Perubahan ini tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi mencerminkan transformasi budaya organisasi menuju birokrasi yang bersih, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini juga berkontribusi terhadap pencapaian tema RKP 2025, dengan menjadikan Kecamatan Megaluh sebagai entitas pemerintahan yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan, melalui kepastian layanan yang adil, transparan, dan profesional.

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Megaluh Tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat peran kecamatan sebagai simpul pelayanan publik dan fasilitator pembangunan yang selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tema RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025, yakni *"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan"*, menjadi landasan utama bagi penyusunan program dan kegiatan yang responsif terhadap kebutuhan lokal, namun tetap terintegrasi dengan prioritas

pembangunan di tingkat provinsi. Kecamatan Megaluh sebagai wilayah yang memiliki potensi ekonomi, kepadatan penduduk, dan dinamika sosial yang cukup kompleks, memerlukan pendekatan pembangunan yang menitik beratkan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas layanan publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis lokalitas dan inovasi.

Dalam kerangka tersebut, Perubahan Renja Kecamatan Megaluh memprioritaskan program-program yang mendukung pencapaian sembilan prioritas pembangunan Jawa Timur tahun 2025, antara lain:

1. Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial.
2. Perluasan lapangan kerja dan pengembangan keunggulan ekonomi.
3. Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor pendidikan dan kesehatan.
4. Pembangunan wilayah terpadu dan berkeadilan.
5. Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai integritas dan budi pekerti luhur.
6. Pengembangan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan berbasis kerakyatan.
7. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui UMKM, koperasi, dan BUMDesa.
8. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan anti-korupsi.
9. Menjaga harmoni sosial & pelestarian budaya serta lingkungan hidup.

Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan karang taruna, fasilitasi UMKM melalui gelar potensi. Kecamatan juga memfasilitasi program-program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan dan penguatan BUMDesa sebagai pendorong transformasi ekonomi di tingkat akar rumput. Dalam mendukung agenda transformasi ekonomi, kegiatan tersebut diarahkan untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil, produktif, dan adaptif terhadap perubahan teknologi dan

kebutuhan pasar.

Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel menjadi bagian integral dalam pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Megaluh. Hal ini sesuai dengan prioritas provinsi di bidang reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Upaya peningkatan akuntabilitas birokrasi dilakukan melalui digitalisasi layanan publik, pengembangan sistem pelaporan kinerja berbasis hasil, serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam manajemen kecamatan. Kegiatan seperti penguatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), pembentukan layanan administrasi terpadu berbasis digital, serta forum evaluasi kinerja lintas sektoral di tingkat kecamatan merupakan langkah konkret dalam menciptakan pemerintahan yang responsif dan profesional. Program pelatihan integritas dan nilai-nilai antikorupsi bagi aparatur kecamatan juga menjadi komponen penting untuk membentuk budaya kerja birokrasi yang melayani dan berintegritas.

3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Daerah harus sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah oleh karena itu tema/arrah pembangunan daerah tahun 2025 adalah **"Hilirisasi Agrobisnis"** yang dijabarkan dalam 3 prioritas pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2025 adalah:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pemenuhan Layanan Dasar dan Kehidupan Yang Harmonis;
2. Peningkatan Layanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas;
3. Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan dan Merata

Guna mendukung Prioritas Pembangunan Daerah tersebut maka dalam menjalankan tugasnya ditetapkan tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja PD, dimana tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu serta untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Megaluh yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dari Perubahan Renja Perubahan tahun 2025 adalah

”Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui Sinergitas kecamatan dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan”.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sasaran PD Kecamatan Megaluh tahun 2025 adalah :

- 1. Meningkatkan sinergitas kecamatan dengan indikator Nilai Sinergitas Kecamatan.***
- 2. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah.***

Sasaran kinerja yang telah direncanakan disusun formulasi perhitungannya. Perhitungan formulasi tersebut adalah sebagai berikut

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, dan Program Renstra Kecamatan Megaluh Tahun 2025-2029

TUJUAN			SASARAN			ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
URAIAN	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui Sinergitas kecamatan	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan	8,84	Meningkatnya sinergitas kecamatan	Nilai Sinergitas Kecamatan	Nilai Sinergitas Kecamatan Megaluh tahun n	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana layanan yang representatif dan ramah masyarakat , termasuk ruang pelayanan, peralatan digital, serta fasilitas pendukung.	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan sarana prasarana dan sistem pelayanan administratif	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
						Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem pengaduan masyarakat yang cepat ditindaklanjuti , mudah diakses, serta mencerminkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan		
						Meningkatkan peran kecamatan dalam memfasilitasi program pemberdayaan berbasis potensi lokal dan prioritas pembangunan desa.	Penguatan kapasitas dan peran kelembagaan masyarakat desa peningkatan kualitas partisipasi warga dalam proses perencanaan pembangunan secara partisipatif.	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

TUJUAN			SASARAN			ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
URAIAN	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI			
						Memperkuat sinergitas antara kecamatan dan pemerintah desa dalam menyusun dan mengawal dokumen perencanaan partisipatif (RPJMDes, RKPDes, dan APBDDes).		
						Meningkatkan peran kecamatan dalam memfasilitasi program pemberdayaan berbasis potensi lokal dan prioritas pembangunan desa.		
						Membangun mekanisme deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi konflik sosial, bencana, atau gangguan ketenteraman.	Penguatan ketenteraman dan ketertiban wilayah melalui optimalisasi peran dan koordinasi lintas sektor dan penanganan gangguan keamanan	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
						Meningkatkan efektivitas koordinasi dan kolaborasi lintas sektor melalui penguatan peran Forkopimcam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan		Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
						Meningkatkan intensitas pembinaan dan asistensi kecamatan terhadap penyusunan dokumen tata kelola pemerintahan desa	Penguatan pembinaan dan pengawasan tata kelola	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

TUJUAN			SASARAN			ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
URAIAN	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI			
							pemerintahan desa	
			Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Megaluh tahun n	Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan instansi terkait bimbingan, sosialisasi, atau internalisasi rutin Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Peningkatan Pemahaman ASN tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
						Penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah pelaporan, monitoring, evaluasi sekaligus analisis capaian kinerja ASN		
						Meningkatkan kualitas regulasi internal terkait reward and punishment yang mendorong penerapan budaya kerja berbasis akuntabilitas dan hasil kerja nyata	Memperkuat Budaya Akuntabilitas di Lingkungan Kecamatan termasuk penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi kerja	

3.3 Perubahan Program dan Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan

- Pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Megaluh diarahkan untuk mencapai Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu **"Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien"** dengan sasaran RPJMD adalah **"Tersedianya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif"** yang selaras dengan tujuan PD yaitu **"Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui Sinergitas kecamatan"**.

- Pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals)

SDGs adalah merupakan program pembangunan yang berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan tenggang waktu yang ditentukan. SDGs merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target SDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Megaluh diimplementasikan untuk mencapai target-target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan

dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Jombang. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Megaluh. Program dan kegiatan yang dirancang pada Perubahan Renja tahun 2025 Kecamatan Megaluh yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses/fasilitasi dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

➤ Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender

Pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) adalah suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui perencanaan dan penerapan kebijakan yang berperspektif gender pada organisasi dan institusi. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi ketimpangan gender, mempromosikan kesetaraan gender, dan meningkatkan kesejahteraan perempuan dan laki-laki secara merata. Kecamatan Megaluh juga ikut aktif dalam mensukseskan program kesetaraan gender, dengan melakukan pemberdayaan dan meningkatkan partisipasi perempuan, disabilitas dan kaum termarginalkan untuk terlibat aktif dalam beberapa kegiatan seperti proses perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan program pembangunan. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu musrenbangdes, musrenbangcam, forum Renja, forum Renstra, forum konsultasi Publik, dan kegiatan PKK.

➤ Pencapaian NSPK dan SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan

adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Megaluh diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

➤ **Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah**

Kecamatan Megaluh sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Jombang memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian. Potensi itu terutama terkait dengan sektor pertanian baik padi, jagung dan tembakau pada musim tertentu. Disamping itu Kecamatan Megaluh termasuk kawasan yang akan dikembangkan menjadi daerah industri, sehingga akan memiliki dampak yang besar dalam penyediaan lapangan kerja dan menunjang perekonomian masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Megaluh dan masyarakat Kabupaten Jombang pada umumnya. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Megaluh.

Di era globalisasi saat ini perkembangan teknologi semakin canggih, kemudahan akses informasi ikut serta membawa perubahan terhadap kebudayaan manusia. Manusia saat ini berbondong-bondong meninggalkan gaya hidup "kolot" menuju gaya hidup modern, sehingga budaya-budaya warisan leluhur mulai terkikis oleh zaman. Masyarakat Indonesia saat ini banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya barat, sehingga sudah jarang ditemukan budaya-budaya nusantara warisan leluhur yang masih terjaga dengan baik oleh generasi penerusnya.

Kecamatan Megaluh pada tahun 2025 ikut serta melestarikan budaya daerah dengan melaksanakan kegiatan seperti pawai budaya dan pagelaran wayang kulit. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada peringatan HUT RI ke-80.

Kegiatan pawai budaya akan dilaksanakan dalam bentuk pawai budaya dalam wadah ekspresi yang kreatif dan inovatif dengan tidak mengubah nilai-nilai esensialnya sebagai sarana pembinaan untuk mempromosikan seni budaya. Acara dibuka dengan sambutan dan pembukaan acara secara resmi oleh Camat Megaluh dan dilanjutkan iring-iringan pawai budaya.

Kegiatan pagelaran wayang kulit merupakan acara penutup peringatan HUT RI ke-80 yang diadakan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar turut serta melestarikan seni dan budaya tradisional.

➤ Pengembangan Daerah Terisolir

Daerah terisolir di Kabupaten Jombang juga mulai dikembangkan. Kegiatan pengembangan tersebut diantaranya dilakukan untuk memberi bantuan kepada warga di desa-desa terpencil dan peningkatan infrastruktur jalan jembatan.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan

Secara umum tidak terdapat perubahan program dan kegiatan di Tahun 2025, akan tetapi sebagai bagian dari upaya Kecamatan Megaluh dalam mencapai target kinerja jangka menengah, pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM, pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh, pendayagunaan potensi ekonomi daerah khususnya yang berbasis agribisnis, serta hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan I dilaksanakan perubahan sub kegiatan, indikator dan target pada beberapa sub kegiatan.

- Jumlah Program dan Kegiatan

Renja Perubahan Kecamatan Megaluh Tahun 2025 mencakup 6 Program, 11 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan bahan logistik kantor
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya
 - b. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - b. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Dari 6 Program, 11 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan yang direncanakan pada Renja Perubahan tahun 2025 untuk dilaksanakan di Kecamatan Megaluh sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Megaluh dan melingkupi semua Desa (13 Desa).

- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Sumber pendanaan seluruh program dan kegiatan pada Renja Perubahan tahun 2025 berasal dari APBD Kabupaten Jombang dengan jumlah seluruhnya adalah Rp.3.098.508.329,35,-

- Tabel Rencana Program dan Kegiatan

Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Renja Perubahan tahun 2025, adalah:

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2025

KECAMATAN MEGALUH

Kod e	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13=(11-7)	14
	Unsur Kewilayahan												
	Kecamatan												
	Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan MEGALUH	71,15	60,61	71,10	2.228.553.703 ,00	-	468.329.830,00	71,10	2.366.719.674 ,00	-	138.165.971,00	
7.0 1.0 1	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan an Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	2.228.553.703 ,00	25,00%	468.329.830,00	100%	2.366.719.674 ,00	-	138.165.971,00	
7.0 1.0 1.2. 01	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%	6.275.000,00	25,00%	2.980.000,00	100%	5.475.000,00	-	(800.000,00)	
7.0 1.0 1.2. 01. 000 1	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokume n	2 dokumen	3 dokume n	5.645.000,00	-	2.822.500,00	3 dokumen	4.845.000,00	-	(800.000,00)	

Kod e	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13=(11-7)	14
7.0 1.0 1.2. 01. 000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 laporan	5 laporan	630.000,00	2 laporan	157.500,00	5 laporan	630.000,00	-	-	
7.0 1.0 1.2. 02	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	100%	1.949.054.103 ,00	28,57%	417.160.444,00	100%	1.907.665.074 ,00	-	(41.389.029,00)	
		Persentase laporan keuangan	100%	100%	100%		100%		100%		-		

Kod e	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13=(11-7)	14
		yang tersusun sesuai aturan											
7.0 1.0 1.2. 02. 000 1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang/ bulan	17 orang/ bulan	17 orang/ bulan	1.875.244.103, 00	17 orang/bula n	399.517.944,00	17 orang/bulan	1.837.935.074, 00	-	(37.309.029,00)	
7.0 1.0 1.2. 02. 000 3	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifi kasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausah aan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	12 dokume n	12 Dokumen	12 dokume n	73.530.000,00	3 dokumen	17.362.500,00	12 dokumen	69.450.000,00	-	(4.080.000)	
7.0 1.0 1.2. 02. 000 5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	280.000,00	1 laporan	280.000,00	1 laporan	280.000,00	-	-	
7.0 1.0	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan administrasi	100%	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

Kod e	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13=(11-7)	14
1.2. 05	Perangkat Daerah	kepegawaian PD Kecamatan MEGALUH											
7.0 1.0 1.2. 05. 000 2	Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	32 paket	14 paket	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
7.0 1.0 1.2. 06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	75.562.190,00	25,00%	14.560.700,00	100%	75.184.190,00	-	(378.000,00)	
7.0 1.0 1.2. 06. 000 2	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	37 paket	36 paket	27 paket	10.468.590,00	24 paket	3.531.400,00	27 paket	10.468.590,00	-	-	
7.0 1.0 1.2. 06. 000 4	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	36.960.000,00	1 paket	5.350.000,00	1 paket	33.920.000,00	-	(3.040.000,00)	Target kinerja tetap dan anggaran berkurang karena adanya kelebihan anggaran mamin pegawai dan akan digeser untuk kegiatan lain yang lebih prioritas yaitu perjalanan dinas luar daerah

Kod e	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13=(11-7)	14
7.0 1.0 1.2. 06. 000 5	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	3.150.000,00	2 paket	1.032.500,00	2 paket	3.150.000,00	-	-	
7.0 1.0 1.2. 06. 000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 dokume n	1 dokumen	1 dokume n	2.352.000,00	1 dokumen	350.000,00	1 dokumen	2.352.000,00	-	-	
7.0 1.0 1.2. 06. 000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	8 laporan	8 laporan	19.389.000,00	2 laporan	3.490.000,00	4 laporan	22.051.000,00	-	2.662.000,00	
7.0 1.0 1.2. 06. 000 1	Penyedian komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	6 paket	3.242.600,00	6 paket	806.800,00	6 paket	3.242.600,00	-	-	
7.0 1.0 1.2. 07	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	20.576.600,00	0%	-	100%	233.948.800,00	-	213.372.200,00	

Kod e	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13=(11-7)	14
7.0 1.0 1.2. 07. 000 9	Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	
7.0 1.0 1.2. 07. 001 0	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	46 unit	7 unit	20.576.600,00	-	-	12 unit	40.897.800,00	5 unit	20.321.200,00	
7.0 1.0 1.2. 08	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	138.340.210,00	25,00%	28.298.686,00	100%	105.701.010,00		(32.639.200,00)	
7.0 1.0 1.2. 08. 000 2	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	31.200.000,00	3 laporan	4.968.520,00	12 laporan	31.200.000,00	-	-	
7.0 1.0 1.2. 08. 000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27 laporan	25 laporan	25 laporan	107.140.210,00	6 laporan	23.330.166,00	25 laporan	74.501.010,00	-	(32.639.200)	

Kod e	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13=(11-7)	14
		yang Disediakan											
7.0 1.0 1.2. 09 09	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	85%	85%	85%	38.745.600,00	85,00%	5.330.000,00	85%	38.745.600,00	-	-	
7.0 1.0 1.2. 09. 000 2	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapanga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	12 unit	12 unit	33.385.600,00	1 unit	3.300.000,00	10 unit	33.385.600,00	-	-	
7.0 1.0 1.2. 09. 000 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	1 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

Kod e	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13=(11-7)	14
7.0 1.0 1.2. 09. 001 0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 unit	10 unit	8 unit	5.360.000,00	3 unit	2.030.000,00	8 unit	5.360.000,00	-	-	
7.0 1.0 2	Program: Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	84	87,33	84	5.945.000,00	-	2.972.500,00	87,33	5.945.000,00	-	-	
7.0 1.0 2.2. 02	Kegiatan : Penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	100%	5.945.000,00	100%	2.972.500,00	100%	5.945.000,00	-	-	
7.0 1.0 2.2. 01. 000 3	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 Laporan	12 laporan	5.945.000,00	3 laporan	2.972.500,00	12 laporan	5.945.000,00	-	-	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13=(11-7)	14
7.0 1.0 5	Program: Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100%	124.155.250,00	20,00%	12.781.650,00	100%	148.155.250,00	-	24.000.000,00	
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%		25,00%		100%		-		
7.0 1.0 5.2. 01	Kegiatan: Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kegiatan PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	124.155.250,00	1 laporan	12.781.650,00	5 laporan	148.155.250,00	-	24.000.000,00	
		Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen		1 dokumen		4 dokumen		-		
7.0 1.0 5.2. 01. 000 3	Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 orang	150 orang	150 orang	97.755.250,00	-	181.650,00	150 orang	97.755.250,00	-	-	
7.0 1.0 5.2. 01.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	26.400.000,00	1 dokumen	12.600.000,00	4 dokumen	50.400.000,00	-	24.000.000,00	Target kinerja tetap dan anggaran bertambah untuk honor

Kod e	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13=(11-7)	14
0008	Pimpinan di Kecamatan	Pimpinan di Kecamatan											Forkopimcam TB III dan IV
7.01.04	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait	100%	100%	100%	3.585.000,00	25,00%	2.055.000,00	100%	4.110.000,00	-	525.000,00	
7.01.04.2.02	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	100%	100%	3.585.000,00	25,00%	2.055.000,00	100%	4.110.000,00	-	525.000,00	
7.01.04.2.02.0001	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	12 laporan	12 laporan	12 laporan	3.585.000,00	3 laporan	2.055.000,00	12 laporan	4.110.000,00	-	525.000,00	

Kod e	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13=(11-7)	14
	Republik Indonesia	Negara Republik Indonesia											
7.0 1.0 6	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%	2.850.000,00	100%	-	100%	2.850.000,00	-	-	
7.0 1.0 6.2. 01	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDesa dengan lengkap	13 Desa	13 Desa	13 desa	2.850.000,00	13 desa	-	13 desa	2.850.000,00	-	-	
7.0 1.0 6.2. 01. 000 3	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa n Aset Desa	26 dokume n	26 dokumen	26 dokume n	2.850.000,00	26 dokumen	-	26 dokumen	2.850.000,00	-	-	

Kod e	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13=(11-7)	14
7.0 1.0 3	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaa n masyarakat yang aktif	100%	100%	100%	145.913.900,0 0	-	12.948.750,00	100%	145.913.900,0 0	-	-	
7.0 1.0 3.2. 01.	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Bad an Usaha Pemberdayaa n Masyarakat Desa yang dibina	26 lembag a	26 Lembaga	26 lembag a	145.913.900,0 0	26 lembaga	12.948.750,00	26 lembaga	145.913.900,0 0	-	-	
		Jumlah Desa yang menyusun RKPD Des	13 desa	13 desa	13 desa		-		13 desa		-		
7.0 1.0 3.2. 01. 000 3	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemberda yaan Masyarak at di Wilayah Kecamata n	4 laporan	4 laporan	4 laporan	132.291.400,0 0	1 laporan	3.475.000,00	4 laporan	133.441.400,0 0	-	1.150.000,00	

Kod e	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13=(11-7)	14
7.0 1.0 3.2. 01. 000 1	Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakata n yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembag a kemasy arakata n	78 lembaga kemasyar akatan	78 lembag a kemasy arakata n	13.622.500,00	-	9.473.750,00	78 lembaga kemasyaraka tan	12.472.500,00	-	(1.150.000,00)	
TOTAL						3.146.429.798 ,00		499.087.730,00		3.098.508.329 ,35		47.921.468,65	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Megaluh Tahun 2025 mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2025 yang merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025- 2029. Pada tahun 2025 terdapat 3 (tiga) prioritas pembangunan kabupaten Jombang adalah:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pemenuhan Layanan Dasar dan Kehidupan Yang Harmonis;
2. Peningkatan Layanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas;
3. Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan dan Merata

Tema/arrah pembangunan daerah tahun 2025 yang harus dapat diwujudkan adalah **"Hilirisasi Agrobisnis"** serta sesuai tugas pokok dan fungsi PD sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang.

Renja Perubahan Kecamatan Megaluh tahun 2025 memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Megaluh.

- 1.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, diantaranya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045.

- 1.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Megaluh berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renja Perubahan Kecamatan Megaluh Tahun

2025 serta diselaraskan dengan Perubahan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2025.

- b. Kecamatan Megaluh berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Megaluh Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Perubahan Renja Kecamatan Megaluh Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2025.
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Megaluh Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.

1.3 Rencana Tindak Lanjut.

Renja Perubahan Kecamatan Megaluh selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2025, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Kecamatan Megaluh Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Perubahan Renja Kecamatan Megaluh juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Perubahan Renja Kecamatan Megaluh ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Jombang serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Jombang. Selanjutnya perlu pula ditingkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta Desa dalam wilayah Kecamatan Megaluh, sehingga makin memantapkan apa yang telah dicapai sekaligus dapat memenuhi harapan masyarakat.

Demikian Perubahan Renja Kecamatan Megaluh Tahun anggaran 2025 yang dapat kami sampaikan, dengan harapan terwujudlah suatu kegiatan pembangunan yang berkesinambungan. Selanjutnya masukan-masukan, koreksi, kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan lebih lanjut.

MEGALUH, Juli 2025

Plt. CAMAT MEGALUH



UMMI SALAMAH, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 197008021992032010